



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI TAHUN 2019
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR :

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan RPJMD Provinsi Riau. Diharapkan nantinya RENJA 2021 dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PERATURAN GUBERNUR RIAU	iv
KEPUTUSAN KEPALA DINAS	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-6
C. Maksud dan Tujuan	I-10
D. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFOTIK TAHUN 2019	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	II-15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II-20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-41
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 2021.....	III-3
3.3. Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB IV PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Indeks Penilaian Indikator kinerja Dinas	II-2
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian RENSTRA	II-5
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Bidang KOMINFOTIK	II-17
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD	II-19
Tabel 2.4.	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	II-37
Tabel 2.5	Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	II-42
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020	III-9
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Riau.....	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (common goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Amanat Undang-undang UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen

dalam Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional yang ada di dalam Renja K/L dan RPJMN berupa usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) atau APBN.

Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2021. Selanjutnya, ditindaklanjuti sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dalam rangka proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun 2021. Setelah itu, RAPBD dibahas, disepakati dan kemudian disahkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2021. Dalam prosesnya berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Tahapan dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah tersebut diatur sesuai PP No 8 Tahun 2008 dan Permendagri No 54 Tahun 2010 dan diperbaharui dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 dengan beberapa tahapan, yaitu Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana.

Secara hierarki penyusunan Renja OPD merupakan turunan dari penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD tersebut. Renja OPD juga diselaraskan dengan Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan OPD. Rencana

kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja OPD akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat empat tahapan utama dalam Penyusunan Renja OPD yakni: persiapan penyusunan Renja OPD, tahap penyusunan rancangan Renja, Pelaksanaan Forum PD dan tahap penetapan Renja OPD.

Sedangkan Tahapan dalam penyusunan Renja OPD sesuai PP No 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yaitu : Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana Kerja.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau pada tahun 2021, mengacu pada tema pembangunan Provinsi Riau 2021 yakni **“MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL MELALUI PEMANTAPAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN DAN PARIWISATA YANG MENDORONG PERDAGANGAN DAN JASA”**

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2021 merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mencapai prioritas pembangunan seperti yang tercakup dalam dokumen RKPD Provinsi Riau pada tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024.

Dalam penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau melakukan inventarisir permasalahan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya (evaluasi renja tahun 2019) dan memperhatikan kondisi eksisting (renja 2020) serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan bidang komunikasi, informatika dan statistik di Provinsi Riau. Oleh karena itu, Renja Organisasi Perangkat Daerah harus mengacu pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Hal ini tentunya disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam menyusun Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021 untuk mencapai

sasaran dan prioritas pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang berkelanjutan dan berkeadilan serta mendukung kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020 - 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan upaya identifikasi dan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi, informatika dan statistik di lingkungan pemerintah Provinsi Riau guna menyusun berbagai program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Periode 1 (satu) tahun ke depan. Pemerintah Provinsi Riau merupakan barometer Pembangunan, terutama dalam implementasi pemanfaatan TIK yang terintegrasi antara kabupaten/kota provinsi dan pemerintah pusat. Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan pembangunan bisa sesuai dengan visi misi yang diterapkan dalam RPJMD Provinsi Riau serta selaras dengan RPJMN.

1.2 LANDASAN HUKUM

Berikut landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2020 :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2021;
 18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
 19. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
 20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian

21. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
22. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2108 Nomor: 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2109 Nomor : 3) ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara *Online* Provinsi Riau;

28. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
29. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 43)
30. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021.
31. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan penyusunan renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan tugas, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2021.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah:

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2021 bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau .

- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFOTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFOTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2019

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kualitatif, sedang data kuantitatif merupakan proses dari pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dari evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2019 terhadap 2 indikator

yang menjadi acuan kinerja, yaitu Indeks Pembangunan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, didapat hasil penilaian:

Tabel.2.1.1 Indeks Penilaian Indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Nilai Indeks	Nilai Indeks	Lembaga Penilai
1.	Indeks e-Government (SPBE)	3,25	3,51 (Sangat Baik)	Kementerian Pendayagunaan Aparatura Negara-Reformasi Birokrasi
2.	Indeks Keterbukaan Informasi	44,50	90-100 (Informatif)	Komisi Informasi Pusat

Sumber: Renstra 2019-2024 Dinas Komunikasi, Informatikan dan Statistik Provinsi Riau; 2019

Dari hasil penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi R.I. (Kemenpan-RB), hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu :

1. *Pada Kebijakan Tata Kelola*, masih punya kelemahan dimana kebijakan informal terkait rencana induk SPBE masih dalam proses. Kebijakan internal tentang pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK masih memuat sebagian dari rencana SPBE.
2. *Pada Kebijakan Layanan*, dimana kebijakan internal terkait Whistle Blowing System (WBS) belum ditetapkan.
3. *Dalam Kelembagaan*, yaitu proses bisnis SOP yang tertuang dalam dokumen masih diterapkan pada sebagian unit kerja.
4. *Untuk Strategi dan Perencanaan*, dokumen rencana induk SPBE Provinsi Riau masih mencakup sebagian dari visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE

(arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE.

5. *Pada Teknologi Informasi dan Komunikasi*, prosedur pengoperasian baku pusat data (data center) dan integrasi sistem aplikasi masih diterapkan oleh sebagian unit kerja.
6. *Dalam Administrasi Pemerintahan*, yang mana Layanan Naskah Dinas , Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Perencanaan belum menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan aplikasi lain.
7. *Pada Pelayanan Publik*, kelemahannya adalah aplikasi WBS belum menyediakan layanan kolaborasi dan belum diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) ke seluruh Badan Publik.

Penilaian tentang Keterbukaan Informasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat, masih terdapat catatan yang perlu untuk ditingkatkan, yaitu:

1. Adanya struktur organisasi PPID;
2. Adanya ringkasan layanan informasi publik yang berisi jumlah pemohon yang diterima, waktu yang diperlukan dalam pemenuhan permohonan informasi publik, dan lain sebagainya;

3. Disediakkannya informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan;
4. Perlu pengembangan kanal PPID yang terhubung dengan situs utama serta media sosial khusus PPID guna penyebaran informasi publik;
5. Pengembangan aplikasi layanan PPID berbasis mobile (android, linux, apple, dan lain sebagainya);
6. Pengumuman tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi pada kanal PPID;
7. Pengembangan aplikasi/tool yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan permohonan keberatan secara online;

Berkaitan dengan Evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 yang mempertimbangkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan Renja Tahun Kedua dalam periode Renstra 2019-2024, maka berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengisian Tabel 2.1.2 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sampai dengan tahun berjalan mencantumkan program dan kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021.

Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2020 Provinsi Riau

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Lembar : 1-6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)*	11 = (10 / 4)*			
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim	5,410 surat	1450	1500	1500	100	160	3110	57,49
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	48 bulan	12	12	12	100	12	36	75
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara.	47 unit	16	18	12	66,67	14	42	89,36
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga dan jenis bahan kebersihan kantor yang disediakan	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	rentang waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik	60 bulan	12	38	38	100	12	62	103,33
0	0	1	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	33,401 kotak	5963	100	100	100	8590	14653	43,87
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5 kali	99	12	12	100	67	178	3560
0	0	1	23	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap/K2	10 orang	2	2	2	100	2	6	60
0	0	1	110	Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah barang barang milik daerah diskominfotik	3 dokumen	0	-	-	-	3	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*			
0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit	1	5	5	100	4	10	200
0	0	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	519 unit	111	300	180	60	144	435	83,82
0	0	2	80	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	85 Unit	19	100	15	15	3	37	43,53
0	0	2	199	Penyediaan Sarana Kearsipan	jumlah jenis sarana kearsipan	1,682 jenis	0	-	-	-	6	6	0,36
0	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
0	0	5	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta diklat	81 orang	32	-	-	-	4	36	44,44
0	0	5	12	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang dibina fisik dan Mental	313 orang	60	81	81	100	70	211	67,41
0	0	5	20	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta upacara Harkitnas	8,447 orang	1500	2947	2500	84,83	1000	5000	59,19

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*			
0	0	6			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
0	0	6	5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan	318 eksp	55	-	-	-	1	56	17,61
0	0	6	6	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah peserta Rapat Koordinasi	310 orang	2	70	70	100	0	72	23,23
0	0	6	30	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	jumlah dokumen	60 eksplr	0	-	-	-	1	1	1,67
0	0	6	120	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	jumlah laporan keuangan opd dan ppkd	2 dokumen	0	-	-	-	5	5	250
1	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	10	17		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi									
1	10	17	3	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah kelompok informasi yang dibina	411 Kelompok	60	21	5	23,81	30	95	23,11
1	10	17	23	Layanan Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau	Semakin Berkualitasnya siaran TV dan Radio di Kab/Kota sesuai dengan prinsip P3SPS	1 Tahun	0	1	0	0	-	0	0
1	10	17	24	Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memahamiketerbukaan infromasipublik	150 Orang	0	150	30	20	-	30	20
1	10	17	25	Forum Pengelola Media Center Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan forum pengelola media center	12 kab/kota	0	12	0	0	-	0	0
1	10	17	26	Layanan Informasi Melalui Media Center	-	0	0	60	0	0	-	0	
1	10	17	27	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga teknis persandian	12 orang	0	-	-	-	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11*			
1	10	17	28	Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMMI)	1 dokumen	0	-	-	-	1	1	100
1	10	17	29	Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan di Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang di assesment dan pengamanan informasi pada objek vital dilingkungan pemerintah daerah	26 aplikasi dan titik	0	-	-	-	26	26	100
1	10	18		Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa									
1	10	18	7	Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	Jumlah aktivitas kemitraan dengan lembaga komunikasi	236 kali	15	-	-	-	1	16	6,78
1	10	18	16	Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal	Jumlah dialog di televisi lokal	80 kali	13	6	2	33,33	31	46	57,50
1	10	19		Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika									
1	10	19	1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	jumlah sarana dan prasarana perangkat jaringan pemerintah provinsi riau	43 jaringan	51	-	-	-	1	52	120,93
1	10	19	2	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah bandwidth dedicated dan broadband up to akses internet	2,350 Mbps	500	500	500	100	350	1350	57,45
1	10	19	10	Pengembangan dan Pengelolaan Comman Center Provinsi Riau	jumlah command center yang dikelola	1 unit	0	-	-	-	1	1	100
1	10	19	12	Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau	Data yang terintegrasi dan bebrbagi pakai OPD di Pemprov Riau Hingga Kab/Kota se Prov Riau	146 data center	0	1	1	100	-	1	#REF!
1	10	19	13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	jumlah sarana dan prasarana perangkat jaringan pemerintah prov riau	153 jaringan	0	51	51	100	-	51	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*			
1	10	20	Program Pengembangan Aplikasi Informatika										
1	10	20	1	Pengembangan e-verment Provinsi Riau	tersediannya layanan aplikasi yang generik dan non generik	215 aplikasi/orang	1	46	46	100	4	51	23,72
1	10	20	8	Pengembangan dan Pengelolaan Command Center Provinsi Riau	jumlah sarana infrastruktur command center	1 command center	0	1	1	100	-	1	100
1	10	21	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik										
1	10	21	1	Pengelolaan website riau..id	Badan publik yang menyediakan layanan kominfo	3 website	1	-	-	-	1	2	66,67
1	10	21	6	Layanan Informasi melalui media center	Jumlah bilik media center yang dikelola/jumlah website media center yang dikelola	8 bilik	6	-	-	-	2	8	100
1	10	21	7	Newsroom pemerintah provinsi riau	Jumlah berita yang dipublikasikan melalui website	25,424 berita	8500	-	-	-	2640	11140	43,82
1	10	21	8	Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau	Jumlah pameran yang dilaksanakan	5 Kali	2	1	1	100	1	4	80
1	10	21	10	Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Acara Yang didokumentasikan	450 acara	100	100	100	100	150	350	77,78
1	10	21	11	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Pelayanan terhadap penyelesaian sengketa informasi	5 bulan	12	12	12	100	40	64	1280
1	10	21	17	Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	jumlah publikasi kelembagaan KIP	50 publikasi	30	130	0	0	260	290	580

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*			
1	10	21	19	Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Media Streaming yang dikembangkan	2 media	0	0	0		2	2	100
1	10	21	27	Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Media Streaming yang dikembangkan	4 Media	0	2	2	100	-	2	50,00
1	10	21	28	Pembinaan PPID di Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	70 unit/kab/kota	0	40	40	100	78	118	168,57
1	10	21	29	Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi/Mediasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan mediasi	35 kab/kota	0	11	11	-	-	0	
1	10	21	32	Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memahami keterbukaan informasi publik	200 orang	0	-	-	-	200	200	100

Sumber : Sistem i-Planning Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja diatas bahwa capaian program dan kegiatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Program/Kegiatan Tahun 2019 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau

3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

- a. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
- b. Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau

4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- a. Dialog Interaktif melalui media televisi lokal

2) Program/Kegiatan Tahun 2019 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - h. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Rapat Koordinasi pada setiap SKPD
5. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
- a. Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau
 - b. Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau
6. Program Pengembangan Aplikasi Informatika
- a. Pengembangan e-government Provinsi Riau

- b. Pengembangan dan Pengelolaan Command Center Provinsi Riau
7. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
- a. Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau
 - b. Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau
 - c. Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
 - d. Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau
 - e. Pembinaan PPID di Provinsi Riau
- 3) Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %.
- 4) Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu : karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan anggaran yang tersedia pada akhir tahun karena kebijakan tidak diakomodirnya tambahan uang persediaan. Hal ini berimplikasi terhadap tidak tercapainya target program Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2. Terjaganya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
 - 3. Terselenggaranya Fasilitasi SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
Seperti:
 - a. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
 - b. Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi

Publik

c. Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur
Pemerintah Provinsi Riau

4. Terselenggaranya Kerjasama Informasi dan Media Massa

6) Dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

1. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun alokasi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu-isu strategis di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian.
3. Mempercepat proses pengajuan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Mengoptimalkan peran kontrol internal pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau agar lebih reaktif dan proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi terkait maupun stakeholders dalam mensinkronkan dan

menyelaraskan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kebijakan nasional pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu untuk menindaklanjuti UU Nomor 11 tahun 2008 tersebut Pemerintah Provinsi Riau berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga.

Dalam penyebaran informasi di Provinsi Riau mempunyai tantangan tersendiri, belum semua desa terjangkau sarana informasi yang memadai. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa dilakukan dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diantaranya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Keberadaan KIM adalah sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berperan sebagai penyebar (*disseminator*) informasi kepada masyarakat. Dikarenakan melalui media ini, masyarakat akan lebih mudah menerima dan menyerap informasi.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi

Riau dan Tujuan, Sasaran RPJMD yang didukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Diskominfo Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran RPJMD dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 yang terkait Bidang Kominfotik

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi					
Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Kinerja	Target 2021	Program Prioritas
1. Peningkatan penerapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang unggul.	1. Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	3,25	1. Program Pengembangan Infrastruktur Elektronik 2. Komunikasi dan Informatika. 3. Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 4. Program Penyelenggaraan Persandian. 5. Program Penyelenggaraan Statistik
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam	2. Peningkatan kualitas sarana prasarana teknologi informasi dalam pemerintahan				

Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019-2024

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang dihadapi Provinsi Riau pada Tahun 2021, maka Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan target 3,25%

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Diskominfo Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pembangunan dari sisi komunikasi, informatika statistik dan persandian yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Kominfo Provinsi Riau, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Diskominfo Provinsi Riau ke depan, baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Diskominfo Provinsi Riau itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Diskominfo Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019–2024 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2018.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2018 n-2	Tahun 2019 n-1	Tahun 2020 n	Tahun 2021 n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi			3,17	3,25	3,33	3,42	3,02	3,51	3,17	3,25	Merupakan Tahun Pertama RPJMD
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			3,17	3,25	3,33	3,42	3,02	3,51	3,17	3,25	Penilaian dilakukan oleh KI Pusat

Sumber: Renstra 2019-2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau; 2019

Berpedoman Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, terdapat satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya Penerapan E-Government. Pencapaian sasaran ini diindikasikan melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdapat formulasi Perhitungan melalui Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) oleh kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur kebijakan internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Tata Kelola (SPBE) dan Layanan (SPBE) tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Sesuai dengan penjabaran RPJMD 2019-2024, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai indikator kinerja utama adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD dan RPJMD yang berkaitan dengan :

2.3.1 Kebijakan Pembangunan Komunikasi dan Informatika:

1. Menyusun aturan (Pergub) agar master plan e-gov menjadi acuan seluruh OPD untuk membangun Teknologi Informasi (TI) agar terintegrasi dan memudahkan pengelolaannya.
 - Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan e-government. Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau menjadi sandaran berpijak bagi Diskominfo untuk berinovasi mengembangkan TI di Pemerintah Provinsi Riau.
 - Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik (*e-Office*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

2. Penyusunan kebijakan/aturan tata kelola TI, uraian jabatan dan tugas organisasi pengelola TI dan pemenuhan kebutuhan SDM untuk mengelola layanan TI dengan baik.
3. Membangun aplikasi yang dapat mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di seluruh OPD. Diskominfotik Provinsi Riau telah menggunakan aplikasi mantra yang dibangun oleh kemkominfo yang dapat mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di seluruh OPD dan kabupaten/kota di Provinsi Riau.
4. Membuat Surat Edaran Gubernur Riau dan memberikan pelatihan kepada seluruh OPD untuk penggunaan e-office di setiap OPD Provinsi dan Kab/kota se Provinsi Riau dengan Surat Edaran Nomor 555/Diskominfotik.UP/III/2015/55.04, perihal Penerapan e-government Pemerintah Provinsi Riau.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran, Diskominfotik Provinsi Riau turun langsung ke OPD yang mengalami gangguan berkaitan dengan penggunaan aplikasi e-office.
5. Menyajikan data/informasi yang bermanfaat melalui website Pemprov Riau dan OPD dengan menyediakan situs yang kontennya menyangkut pembangunan dan potensi Provinsi Riau yaitu website riau.go.id, diskominfotik.go.id, mediacenter.riau.go.id, infopublik.riau.go.id dan ppid.riau.go.id. sebagai media informasi bagi masyarakat Riau khususnya dan masyarakat di seluruh indonesia umumnya.
6. Penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat.

Melalui sebuah wadah bilik media center disediakan jaringan internet yang gratis bagi masyarakat yang berkunjung di bilik ini. Tahun 2019 jumlah pengunjung tercatat mencapai 1.745 orang pengunjung. Para awak media dari beberapa media baik media cetak maupun media online dapat mengupload berita melalui bilik ini. Seperti wartawan dari media, nusapos.com, potretnews.com, CNN indonesia, bermadah.com, sigap.com, genius, narapos, riaupos, haluan riau, rtv, dan radar.

7. Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan media TV streaming.riau.go.id dan radio. Menyediakan pelayanan informasi melalui media televisi dan radio yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi Riau. Media ini notabene peningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pendekatan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang terdiri didalamnya UKM media sebagai ajang promosi produk masyarakat lokal. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah dibina oleh Diskominfotik Provinsi Riau sebanyak 42 kelompok, mereka sudah terdaftar secara nasional namun masih ada di Kabupaten yang belum terdaftar dan baru mulai didata oleh Diskominfotik.
8. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui pelatihan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
9. Integrasi yang telah dilakukan pada Bidang Statistik adalah pada Aplikasi Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah (SDDKD) Pemprov Riau Bersama dengan Sistem Database Dukungan

Kebijakan Nasional (SDDKN) Sekretariat Negara RI yang mana telah terlebih dahulu terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Integrasi menggunakan aplikasi MANTRA dari Kominfo Jakarta melalui jalur Government Service Bus (GSB) milik Pemprov Riau dengan Kominfo Jakarta. Integrasi dilakukan pada field-field data yang sama antara SDDKD dengan SDDKN yaitu sebanyak 1139 field data, dan 512 data yang sama antara SDDKN dengan SIPD.

10. Inventarisasi Kebutuhan Komunikasi Jaring Sandi



2.3.2 Permasalahan dan Hambatan :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis internet saat ini sudah semakin meningkat. Oleh karena itu yang menjadi isu terkini adalah pentingnya dilakukan kegiatan kampanye penggunaan internet sehat dan benar, peningkatan web security terhadap konten-konten pornografi dan kekerasan.
2. Belum optimalnya pengelolaan persandian dalam rangka pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Riau.
3. Belum tersedianya sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendukung sistem teknologi informasi. Isu strategisnya adalah peningkatan kegiatan *capacity building* berupa pendidikan dan latihan.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur di bidang TIK.
6. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi dan sarana prasarana komunikasi.
7. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi.
8. Belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik.
9. Masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID.
10. Kurangnya komitmen dari setiap OPD dan instansi lainnya dalam meningkatkan produksi data sektoral.

11. Perlu adanya blueprint penyediaan data sektoral pada setiap OPD dan instansi lainnya.
12. Perlunya optimalisasi peningkatan sumber daya aparatur dalam menganalisis, mengolah, dan menyajikan data dan informasi statistik sektoral dan geospasial tematik.
13. Belum adanya penanggungjawab pengelola data sektoral di setiap OPD dan instansi lainnya yang bertugas mewakili dan bertanggungjawab dalam penyediaan data.
14. Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Permasalahan dan hambatan tersebut diatas, jika tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada menurunnya kinerja perangkat daerah. Yang pada akhirnya akan berimbas pada pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Pada RPJMD Provinsi Riau, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD. Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah Mis ke 5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Tantangan dalam pelayanan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Serta Persandian secara umum, yaitu :

1. Keterbatasan tenaga teknis Terkait dengan Peningkatan Pelayanan Publik.
2. Kurang lengkapnya inventarisasi data.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional lapangan untuk menunjang kegiatan inventarisasi dan pembinaan.
4. Perubahan Regulasi yang kadang tidak disertai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas.

Sedangkan Peluang dalam Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Serta Persandian secara umum, yaitu:

1. Mengoptimalkan Sumber daya Manusia Terkait dengan Peningkatan Pelayanan Publik.
2. Mengoptimalkan Fungsi Sarana Pra sarana Penunjang operasional lapangan untuk menunjang kegiatan inventarisasi dan pembinaan
3. Membenahi Sarana Prasarana Penunjang Operasional.
4. Melaksanakan Pelatihan secara Teknis buat mengoptimalkan Kinerja Tenaga Teknis.
5. Membenahi Perubahan Regulasi.

2.3.5 Isu-isu penting yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2019-2024.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Isu-isu strategis terkait urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yakni :

1. Percepatan pelaksanaan e-government di OPD Pemprov Riau melalui penyediaan infrastruktur TIK, SDM, dan Aplikasi. Dengan telah menjalankan kebijakan pembangunan Diskominfo Provinsi Riau di berbagai sektor program untuk percepatan perkembangan isu-isu yang menyangkut e-government di OPD Pemprov Riau.
2. Penyediaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan telah dibangunnya aplikasi lapor.riau.go.id, dan PPID.riau.go.id yang dapat menampung aspirasi dan pusat informasi masyarakat.
3. Optimalisasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik.
4. Pengembangan aplikasi rumah data sebagai wadah inovasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi statistik sektoral dan spasial yang dapat diakses oleh para pihak serta dapat meningkatkan layanan publik yang optimal.
5. Optimalisasi pengelolaan persandian dalam rangka pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Riau.

Dengan menjalankan kebijakan program dan kegiatan pembangunan Diskominfotik Provinsi Riau tahun 2021 di berbagai sektor, maka percepatan penyelesaian isu-isu yang menyangkut e-government di OPD Pemprov Riau, dapat teratasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagian besar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sudah menerapkan Tata Kelola TIK, namun dengan kapasitas yang berbeda dan sesuai dengan kondisi SDM yang tersedia dan adanya dukungan Pimpinan. Kendala yang umum pada penerapan tata kelola TIK dan tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintah adalah; SDM, Komitmen Pimpinan dan pendanaan (sistem anggaran yang sangat kaku).

Dalam menerapkan tata kelola keamanan informasi dibutuhkan sebuah kesadaran, dasar / landasan hukum dan kebijakan yang cukup kuat, kelembagaan dan penanggung jawab, sumber pendanaan, ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang digunakan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami TIK dan keamanan informasi serta komitmen pimpinan.

Oleh karna itu rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Dokumen perencanaan daerah terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen perencanaan tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan program / kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau melakukan review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2021. Berdasarkan hasil review tersebut, ternyata ada beberapa kegiatan yang perlu diakomodir dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2021. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki korelasi langsung terhadap akselerasi pencapaian visi dan misi yang telah digariskan. Hal ini tentunya sesuai dengan dinamika perkembangan kemajuan TIK dan tuntutan masyarakat akan pelayanan birokrasi yang semakin baik, cepat dan transparan.

Rancangan awal RKPD ini disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024, khususnya penganggaran pada tahun 2021.

Pagu Dinas Kominfo Provinsi Riau dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 adalah Rp. 18.071.580.000 terdiri atas 7 Program dan 34 Kegiatan rincian masing – masing pagu program yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2.720.230.000)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (168.850.000)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (73.870.000)
4. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika (850.470.000)
5. Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (12.780.150.000)
6. Program Penyelenggaraan Statistik (700.400.000)
7. Program Penyelenggaraan Persandian (777.610.000)

Sebagai provinsi yang menjadi pusat perekonomian pada tahun 2021, Provinsi Riau akan mempersiapkan infrastruktur, mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan dan ramah lingkungan, pembangunan kawasan perkotaan, pembangunan kawasan perdesaan, penanganan berbagai dampak dan isu pemanasan global, memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.

Di samping itu, pemerintah Provinsi Riau memperhatikan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok

masyarakat melalui pembangunan infrastruktur perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi masyarakat dengan melibatkan pelaku usaha.

Perhatian pemerintah adalah pengembangan Sumber Daya Manusia, agar bermakna dan berkembang ke arah lebih baik dan mempunyai daya saing dengan daerah lain, mempermudah akses memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi. Juga kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan sarana dan prasarana masyarakat beragama, seni budaya dan moral.

Selanjutnya, pemerintah Provinsi Riau tetap memperhatikan keikutsertaan dan peran pihak swasta dalam pembangunan perekonomian percepatan investasi dan stabilitas pembangunan ekonomi melalui penciptaan rasa aman, kepastian hukum, percepatan pelayanan perizinan usaha, penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar.

Di sisi lain, aparat pemerintah Provinsi Riau harus berkemampuan, profesional, bermoral serta keteladanan pemimpin, melalui penguatan kelembagaan dan kualitas aparat, untuk pencapaian kehidupan yang sejahtera bertata kehidupan dan penghidupan, baik materil maupun spritual bagi setiap masyarakat.

Misi pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah misi ke 5 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola**

Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi, dengan tujuan peningkatan kinerja ASN pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sasaran yang ke 2 pada Misi ke 5, yaitu **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.**

Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke lima ini yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah : **Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).** Oleh sebab itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dituntut untuk dapat mewujudkan misi tersebut, untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau, sehingga dapat menciptakan tatakelola yang handal, perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan di Provinsi Riau.

Dengan demikian , pagu Rancangan Awal Renja Dinas Kominfo Provinsi Riau Tahun 2021 menjadi Rp. 18.412.068.962 yang meliputi 7

Program dan 34 Kegiatan , dimana rincian masing – masing pagu program terdiri atas :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.711.973.594)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (216.000.000)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (70.000.000)
4. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika (2.821.648.640)
5. Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (12.369.054.544)
6. Program Penyelenggaraan Statistik (577.778.872)
7. Program Penyelenggaraan Persandian (645.613.312)

Dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Dinas KOMINFOTIK Provinsi Riau Tahun 2021 telah dilakukan verifikasi yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi i-planning oleh Bidang Mitra Bappedalitbang Provinsi Riau. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat point-point yang harus disesuaikan kembali pada Rencana Kegiatan (RK) Dinas KOMINFOTIK Provinsi Riau Tahun 2021.

Mengapa Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional dalam hal sistem perencanaan dan penganggaran
 - Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program dan kegiatan mengikuti Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019 dengan melakukan mapping program/kegiatan dalam

Renstra menjadi program/kegiatan/subkegiatan sesuai Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019

- Penyesuaian input e-planning melalui SIPD Kemendagri berdasarkan arahan Permendagri RI Nomor 70 Tahun 2019
- Penyesuaian terhadap Perpres RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

2. Penyesuaian terhadap kondisi saat ini karena adanya Pandemi Covid-19

- Penyesuaian terhadap kebijakan nasional/RKP dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021
- Penyesuaian tema dan fokus pembangunan tahun 2021 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi sosial
- Penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah karena adanya penurunan pendapatan daerah, pengurangan belanja daerah (belanja langsung), penyesuaian (refocussing) belanja terhadap tema dan fokus pembangunan tahun 2021
- Penyelarasan kembali terhadap program/kegiatan prioritas yang ditunda pelaksanaannya tahun 2020

Selanjutnya, setelah proses tersebut dilakukan ditemukan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Dengan adanya kebijakan tentang pembayaran BPJS untuk Tenaga Harian Lepas (THL) di Perangkat Daerah masing-masing sehingga pagu Rancangan Akhir Renja

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021 berubah. Untuk lebih jelasnya, hasil analisis kebutuhan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Provinsi Riau**

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Lembar 1 dari 4

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.577.684.445	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.711.973.594	
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pekanbaru	Jumlah Surat yang Dikirim	160 Surat	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pekanbaru	Jumlah Surat yang Dikirim	160 Surat	10.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah rekening yang dibayar	12 Rekening	531.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah rekening yang dibayar	12 Rekening	6.000.000	
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Unit	82.200.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Unit	100.000.000	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	115.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	75.000.000	
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 Unit	200.000.000	
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	37 Jenis	250.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	37 Jenis	175.000.000	
7.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	22 Jenis	105.606.580	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	22 Jenis	62.131.194	
8.	Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi	10 Jenis	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi	10 Jenis	50.000.000	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	kota pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	9500 Porsi	284.352.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	kota pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	9500 Porsi	200.000.000
10.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160 Kali	689.984.115	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160 Kali	600.000.000
11.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	48 OB	168.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	48 OB	168.842.400
12.	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik Provinsi Riau	Jumlah Peserta Harkitnas	1000 orang	58.251.750	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik Provinsi Riau	Jumlah Peserta Harkitnas	1000 orang	40.000.000
13.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Provinsi Riau dan kab/kota se-Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	58.290.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Provinsi Riau dan kab/kota se-Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	25.000.000
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 Persen	160.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 Persen	216.000.000
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	4 Ruang	55.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	4 Ruang	50.000.000
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	kota pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	142 Unit	105.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	kota pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	142 Unit	166.000.000
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100 Persen	70.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100 Persen	70.000.000
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100 Stel	70.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100 Stel	70.000.000
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Persentase Sistem Informasi dan Aplikasi yang dikelola	75 Persen	805.903.000	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Persentase Sistem Informasi dan Aplikasi yang dikelola	80 Persen	2.821.648.640

1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan dan Data Center	Kota Pekanbaru	Jumlah Data Center yang Dikelola	11 unit	299.488.000	Pegelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan dan Data Center	Kota Pekanbaru	Jumlah Data Center yang Dikelola	11 unit	300.000.000
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Command Center	Kota Pekanbaru	Jumlah Command Center yang dikelola	1 Unit	332.304.000	Pengelolaan dan Pengembangan Command Center	Kota Pekanbaru	Jumlah Command Center yang dikelola	1 Unit	322.898.640
3.	Pembinaan Kemitraan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pelibatan Komunitas Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi	12 Kabupaten Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Keterbukaan Informasi	80 Orang	174.111.000	Pembinaan Kemitraan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pelibatan Komunitas Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi	12 Kabupaten Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Keterbukaan Informasi	80 Orang	2.198.750.000
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK		Persentase Indikator SPBE yang terpenuhi	75 Persen	12.110.429.585	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK		Persentase Indikator SPBE yang terpenuhi	80 Persen	12.369.054.544
1.	Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pekanbaru	Jumlah Regulasi atau Kebijakan SPBE	4 Peraturan	229.011.000	Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pekanbaru	Jumlah Regulasi atau Kebijakan SPBE	4 Peraturan	198.544.320
2.	Pengembangan E-Government Provinsi Riau	Pekanbaru	Layanan Aplikasi Generik dan Non Generik	4 Aplikasi	794.228.000	Pengembangan E-Government Provinsi Riau	Pekanbaru	Layanan Aplikasi Generik dan Non Generik	4 Aplikasi	762.203.688
3.	Pengelolaan Multimedia dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Multimedia dan Dokumentasi yang dihasilkan	300 Kali	2.230.959.885	Pengelolaan Multimedia dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Multimedia dan Dokumentasi yang dihasilkan	300 Kali	1.578.937.552
4.	Pembinaan PPID Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah OPD yang dibina	40 OPD Pemprov dan Kab/Kota	386.593.600	Pembinaan PPID Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah OPD yang dibina	40 OPD Pemprov dan Kab/Kota	399.024.560
5.	Penyebarluasan Informasi	Pekanbaru	Jumlah Informasi yang disebarluaskan	11680 Kali	865.851.400	Penyebarluasan Informasi	Pekanbaru	Jumlah Informasi yang disebarluaskan	11680 Kali	3.222.925.968
6.	Pengelolaan Data dan Interoperabilitas Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Web API yang terintegrasi dan berbagi pakai	30 Web API	252.356.000	Pengelolaan Data dan Interoperabilitas Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Web API yang terintegrasi dan berbagi pakai	30 Web API	88.114.352
7.	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Sengketa Informasi Yang ditangani	40 sengketa	1.704.342.600	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Sengketa Informasi Yang ditangani	40 sengketa	1.902.563.488
8.	Penguatan Kelembagaan KIP serta kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Provinsi Riau	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Pemdes	1800 orang	1.499.487.100	Penguatan Kelembagaan KIP serta kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Provinsi Riau	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Pemdes	1800 orang	1.000.000.000

9.	Pengelolaan Bandwith Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	Volume Bandwith yang disediakan	500 MBPS	4.147.600.000	Pengelolaan Bandwith Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	Volume Bandwith yang disediakan	500 MBPS	3.216.740.616
	STATISTIK				663.700.000	STATISTIK				577.778.872
VI.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK		Persentase Data Sektoral Yang Tersusun	75 Persen	663.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK		Persentase Data Sektoral Yang Tersusun	80 Persen	577.778.872
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Data Sektoral dan Spasial	Pekanbaru	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	129.833.200	Pembinaan Penyelenggaraan Data Sektoral dan Spasial	Pekanbaru	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	115.539.000
2.	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi data Sektoral Pemerintah Daerah Se-Propinsi Riau	Kab/kota Se Propinsi Riau	Jumlah data Sektoral yang terkumpul	3100 data	308.791.800	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi data Sektoral Pemerintah Daerah Se-Propinsi Riau	Kab/kota Se Propinsi Riau	Jumlah data Sektoral yang terkumpul	3100 data	245.014.584
3.	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se Propinsi Riau	Kab/kota Se Propinsi Riau	Jumlah Data Sektoral yang diolah	3100 data	225.075.000	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se Propinsi Riau	Kab/kota Se Propinsi Riau	Jumlah Data Sektoral yang diolah	3100 data	217.225.288
	PERSANDIAN				736.860.000	PERSANDIAN				645.613.312
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN		Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	75 Persen	736.860.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN		Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80 Persen	645.613.312
1.	Tata Kelola Keamanan Informasi	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Persandian yang ditata/dikelola	25 paket	408.736.000	Tata Kelola Keamanan Informasi	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Persandian yang ditata/dikelola	25 paket	318.602.656
2.	Pengembangan Layanan Kemanan Informasi	Provinsi Riau	Jumlah Layanan dan Prasarana Kemanan Informasi yang dikembangkan	36 titik	224.594.000	Pengembangan Layanan Kemanan Informasi	Provinsi Riau	Jumlah Layanan dan Prasarana Kemanan Informasi yang dikembangkan	36 titik	232.185.328
3.	Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	Pemerintah Provinsi dan kab.Kota Se Propinsi Riau	Frekuensi Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	1 dokumen	103.530.000	Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	Pemerintah Provinsi dan kab.Kota Se Propinsi Riau	Frekuensi Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	1 dokumen	94.825.328
J U M L A H					17.124.577.030					18.412.068.962

Sumber: Sistem i-Planning Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau; 2020

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Hal ini berguna untuk menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan kepentingan terkait pelayanan OPD. Dalam konteks itulah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mengakomodir usulan – usulan program / kegiatan dari masyarakat, dan para pemangku kepentingan sesuai dengan isu – isu strategis dalam penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika.

Isu-isu penting sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program dan kegiatan, yakni:

1. Percepatan pelaksanaan e-government di OPD Pemprov Riau melalui penyediaan infrastruktur TIK, SDM, dan Aplikasi.
2. Penyediaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
3. Optimalisasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik.
4. Pengembangan aplikasi rumah data sebagai wadah inovasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi statistik sektoral dan spasial yang dapat diakses oleh para pihak serta dapat meningkatkan layanan publik yang optimal.
5. Optimalisasi pengelolaan persandian dalam rangka pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Riau.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mengikuti rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya forum konsultasi publik. Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Melalui forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, LSM dan OPD di Provinsi. Dari hasil forum konsultasi tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih terkait pada pelayanan publik di sektor-sektor pembangunan.

Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Tabel 2.5. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021

Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Selain usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau juga menangani Komisi Informasi, yang sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekarang bergabung di bawah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Komisi Informasi Publik adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik disingkat dengan UU-KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Tepatnya pada Bab VII UUKIP mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab Komisi Informasi serta tata cara pembentukan, proses rekrutment Komisi Informasi dari tingkat pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan wakil Ketua merangkap anggota serta 3 orang anggota-anggotanya.

Komisi Informasi Provinsi adalah lembaga mandiri di tingkat Provinsi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan adjudikasi nonlitigasi di masing-masing provinsi.

Sesuai dengan pasal 33 UU-KIP bahwa Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Tugas dari Komisi Informasi yakni melakukan penyelesaian sengketa informasi, Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tema yang diangkat adalah “mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yang mengambil tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan formasi Sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana”.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah RKP tahun kedua pelaksanaan RPJMN IV (2020-2024), memuat program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang bersifat multiyear atau on-going, memuat program yang menjadi pijakan kokoh untuk memudahkan pekerjaan Pemerintah selanjutnya, yang mendapat mandat untuk memimpin Indonesia.

Adapun arah kebijakan dan prioritas strategi RPJMN 2020-2024 Bidang Komunikasi adalah Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik melalui strategi :

- a. Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik.

- b. Penguatan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi utama masyarakat.
- c. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T.
- d. Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi.
- e. Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital.
- f. Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendekatan sosial budaya.
- g. Penyusunan standarisasi lembaga pers dan jurnalis.
- h. Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.

Adapun Tema RKP Tahun 2021 adalah :

"Mempercepat Pemulihan Ketahanan ekonomi dan Kehidupan Bermasyarakat."

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbagunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk sinergitas program dan kegiatan pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun 2021, disusunlah rencana kerja tahunan untuk tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Riau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 2021.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan Misi Pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah misi ke 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi, dengan tujuan peningkatan kinerja ASN pelayanan publik, dan

peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sasaran yang ke 2 pada Misi ke 5, yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Mengacu pada tema pembangunan Provinsi Riau, faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2021 pada Diskominfo Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Riau, yakni Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mencapai prioritas pembangunan yang diberikan kepada Diskominfo Provinsi Riau, disusunlah sasaran yang akan menunjang tujuan, yakni:

1. Tersedianya Kebijakan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika;
2. Meningkatnya Tata Kelola SPBE
3. Meningkatnya Layanan SPBE
4. Meningkatnya Pengamanan SPBE
5. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektorial dan Spasial

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Program dan kegiatan merupakan upaya dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021, yaitu :

1. Tercapainya Prioritas Nasional 1 (Ketahanan Ekonomi) dan Prioritas Nasional 7 (Transformasi Pelayanan Publik) pada RKP Tahun 2021 berdasarkan Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Tercapainya Misi 5 (Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi) pada Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

3. Tersusunnya kebijakan pemerintah daerah dalam Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk menunjang kinerja birokrasi.
4. Terciptanya arah peningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi.

Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke lima ini yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah : **Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)**. Oleh sebab itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dituntut untuk dapat mewujudkan misi tersebut, untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau, sehingga dapat menciptakan tata kelola yang handal, perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan di Provinsi Riau.

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 63/SE/2020, Tanggal 2 Maret 2020 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, bahwa Pagu Indikatif Belanja Langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 adalah sebesar Rp.17.594.399.000,00,-

Setelah terjadinya pembahasan mengenai program dan kegiatan yang dibutuhkan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau terjadi fluktuasi biaya dan memerlukan biaya sebesar Rp.18.071.576.800.

Program-Program Dinas Kominfortik Provinsi Riau Tahun 2021 :

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rp. 2.720.230.000,-)
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rp. 168.850.000,-)

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Rp. 73.870.000,-)
6. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika (Rp. 850.470.000,-)
7. Program Penyelenggraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Rp. 12.780.150.000,-)
8. Program Penyelenggaraan Statistik (Rp. 700.396.800,-)
9. Program Peningkatan Penyelenggaraan Persandian (Rp. 777.610.000,-)

Pada proses Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2021 terdiri dari 7 program dan 34 kegiatan dengan rincian masing- masing pagu program hasil verifikasi oleh Bidang Mitra Bappedalitbang Provinsi Riau yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rp. 1.711.973.594,-)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rp. 216.000.000,-)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Rp. 70.000.000,-)
4. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika (Rp. 2.821.648.640,-)
5. Program Penyelenggraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Rp. 12.369.054.544,-)
6. Program Penyelenggaraan Statistik (Rp. 577.778.872,-)
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Persandian (Rp. 645.613.312,-)

Pertimbangan dilakukannya Penyesuaian Rancangan Akhir dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional dalam hal sistem perencanaan dan penganggaran
 - Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program dan kegiatan mengikuti Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019 dengan melakukan mapping

program/kegiatan dalam Renstra menjadi program/kegiatan/subkegiatan sesuai Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019

- Penyesuaian input e-planning melalui SIPD Kemendagri berdasarkan arahan Permendagri RI Nomor 70 Tahun 2019
- Penyesuaian terhadap Perpres RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

2. Penyesuaian terhadap kondisi saat ini karena adanya Pandemi Covid-19

- Penyesuaian terhadap kebijakan nasional/RKP dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021
- Penyesuaian tema dan fokus pembangunan tahun 2021 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi sosial
- Penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah karena adanya penurunan pendapatan daerah, pengurangan belanja daerah (belanja langsung), penyesuaian (refocussing) belanja terhadap tema dan fokus pembangunan tahun 2021
- Penyelarasan kembali terhadap program/kegiatan prioritas yang ditunda pelaksanaannya tahun 2020

Adapun rincian rencana kegiatan per program serta indikator kinerja

Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 (Tabel T- C.33.) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Lembar 1 dari 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.10.01.0.0.00.0 1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	1.711.973.594			100 Persen	2.907.310.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Pekanbaru	160 Surat	10.000.000	APBD		264 Surat	15.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Pekanbaru	12 Rekening	6.000.000	APBD		12 Rekening	12.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pekanbaru	21 Unit	100.000.000	APBD		25 Unit	580.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Pekanbaru	12 Bulan	75.000.000	APBD		12 Bulan	145.000.000
1.2.10 .01.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	pekanbaru	18 Unit	200.000.000	APBD		18 Unit	300.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Pekanbaru	41 Jenis	175.000.000	APBD		40 Jenis	275.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.008.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Pekanbaru	25 Jenis	62.131.194	APBD		25 Jenis	140.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Pekanbaru	15 Jenis	50.000.000	APBD		20 Jenis	100.000.000

	Bangunan Kantor	bangunan kantor yang disediakan							
1.2.10.01.0.0.00.0 1.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Pekanbaru	8160 Porsi	200.000.000	APBD		13820 Porsi	314.020.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah Prov. Riau	170 Kali	600.000.000	APBD		170 Kali	725.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang disediakan	Pekanbaru	4 OB	168.842.400	APBD		4 OB	168.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.033.	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Peserta Harkitnas	Pekanbaru	500 orang	40.000.000	APBD		1000 orang	75.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Pekanbaru	3 Dokumen	25.000.000	APBD		3 Dokumen	58.290.000
1.2.10.01.0.0.00.0 2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	216.000.000			100 Persen	180.460.000
1.2.10.01.0.0.00.0 2.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	4 Ruang	50.000.000	APBD		4 Ruang	75.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 2.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	217 Unit	166.000.000	APBD		142 Unit	105.460.000
1.2.10.01.0.0.00.0 3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	70.000.000			100 Persen	78.950.000
1.2.10.01.0.0.00.0 3.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pekanbaru	100 Stel	70.000.000	APBD		100 Stel	78.950.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DAN	Persentase Sistem Informasi dan Aplikasi yang dikelola		80 Persen	2.821.648.640			85 Persen	908.960.000

	INFORMATIKA								
1.2.10.01.1.2.10.1 5.002.	Pegelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan dan Data Center	Jumlah Data Center yang Dikelola	Pekanbaru	11 unit	300.000.000	APBD		11 unit	351.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.003.	Pengelolaan dan Pengembangan Command Center	Jumlah Command Center yang dikelola	Pekanbaru	1 Unit	322.898.640	APBD		1 Unit	362.960.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.004.	Pembinaan Kemitraan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pelibatan Komunitas Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Keterbukaan Informasi	Pelalawan, Kuansing	12 kelompok KIM	2.198.750.000	APBD		12 Kelompok	195.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Persentase Indikator SPBE yang terpenuhi		80 Persen	12.369.054.544			85 Persen	13.659.060.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.001.	Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE	Jumlah Regulasi atau Kebijakan SPBE	Pekanbaru	4 Peraturan	198.544.320	APBD		4 Peraturan	268.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.003.	Pengembangan E-Government Provinsi Riau	Layanan Aplikasi Generik dan Non Generik	Pekanbaru	6 Aplikasi	762.203.688	APBD		6 Aplikasi	920.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.004.	Pengelolaan Multimedia dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Multimedia dan Dokumentasi yang dihasilkan	Pekanbaru	300 Kali	1.578.937.552	APBD		300 Kali	2.231.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.005.	Pembinaan PPID Provinsi Riau	Jumlah OPD yang dibina	Pekanbaru	40 OPD Pemprov dan Kab/Kota	399.024.560	APBD		40 OPD Pemprov dan Kab/Kota	475.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.006.	Penyebarluasan Informasi	Jumlah Informasi yang disebarluaskan	Pekanbaru	9604 Kali	3.222.925.968	APBD		9604 Kali	936.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.007.	Pengelolaan Data dan Interoperabilitas Provinsi Riau	Jumlah Web API yang terintegrasi dan berbagi pakai	Pekanbaru	25 Web API	88.114.352	APBD		25 Web API	322.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.008.	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Jumlah Sengketa Informasi Yang ditangani	Pekanbaru	40 sengketa	1.902.563.488	APBD		40 sengketa	1.715.000.000

1.2.10.01.1.2.10.1 6.009.	Penguatan Kelembagaan KIP serta kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Pemdes	Pekanbaru	700 orang	1.000.000.000	APBD		1800 orang	1.510.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.010.	Pengelolaan Bandwith Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Prov Riau	Volume Bandwith yang disediakan	Pekanbaru	1000 MBPS	3.216.740.616	APBD		1600 MBPS	5.282.060.000
1.2.10.01.1.2.14.1 5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	Persentase Data Sektoral Yang Tersusun		80 Persen	577.778.872			85 Persen	748.570.000
1.2.10.01.1.2.14.1 5.004.	Pembinaan Penyelenggaraan Data Sektoral dan Spasial	Jumlah Dokumen	Pekanbaru	1 Dokumen	115.539.000	APBD		1 Dokumen	169.600.000
1.2.10.01.1.2.14.1 5.005.	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi data Sektoral Pemerintah Daerah Se-Propinsi Riau	Jumlah data Sektoral yang terkumpul	Kab/kota Se Propinsi Riau	3200 data	245.014.584	APBD		3200 data	330.000.000
1.2.10.01.1.2.14.1 5.006.	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se Propinsi Riau	Jumlah Data Sektoral yang diolah	Pekanbaru	3200 data	217.225.288	APBD		3200 data	248.970.000
1.2.10.01.1.2.15.1 5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi		80 Persen	645.613.312			85 Persen	831.090.000
1.2.10.01.1.2.15.1 5.005.	Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Prasarana Persandian yang ditata/dikelola	Pekanbaru	3 paket	318.602.656	APBD		3 paket	427.000.000
1.2.10.01.1.2.15.1 5.006.	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Layanan dan Prasarana Kemanan Informasi yang dikembangkan	Pekanbaru	36 titik	232.185.328	APBD		36 titik	256.000.000
1.2.10.01.1.2.15.1 5.007.	Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	Frekuensi Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	Pekanbaru	1 dokumen	94.825.328	APBD		1 dokumen	148.090.000
J U M L A H									18.412.068.962
									19.314.400.000

Sumber: Sistem i-Planning Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau; 2020

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2021 mempunyai 7 program dan 34 kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 4 program, sedangkan 3 program sebagai pendukung atau Non Urusan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur, sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada 4 yaitu Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi Dan Informasi, Program Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Program Penyelenggaraan Statistik, dan Program Penyelenggaraan Persandian. Usulan pendanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebesar Rp.18.412.068.962,-

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau tertuang dalam Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 PROVINSI RIAU

Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Forum PD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Persentase Pemenuhan	100 Persen	100 Persen	1.711.973.594,00	2907310000	
0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat				10.000.000	15.000.000	
0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				6.000.000	12.000.000	
0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000	580.000.000	
0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				75.000.000	145.000.000	
0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan				200.000.000	300.000.000	
0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor				175.000.000	275.000.000	
0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				62.131.194	140.000.000	
0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				50.000.000	100.000.000	
0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman				200.000.000	314.020.000	

0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah				600.000.000	725.000.000	
0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor				168.842.400	168.000.000	
0.0.00.01.033.	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan kebangsaan				40.000.000	75.000.000	
0.0.00.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD				25.000.000	58.290.000	
0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	Persentase Pemenuhan	100 Persen	100 Persen	216.000.000,00	180460000	
0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				50.000.000	75.000.000	
0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				166.000.000	105.460.000	
0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat	100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	78950000	
0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				70.000.000	78.950.000	
1.2.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	Persentase Sistem	80 Persen	85 Persen	2.821.648.640,00	908960000	
1.2.10.15.002.	Pegelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana				300.000.000	351.000.000	
1.2.10.15.003.	Pengelolaan dan Pengembangan Command Center				322.898.640	362.960.000	
1.2.10.15.004.	Pembinaan Kemitraan Kelompok Informasi Masyarakat				2.198.750.000	195.000.000	
1.2.10.16.	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM	Persentase Indikator	80 Persen	85 Persen	12.369.054.544,00	13659060000	
1.2.10.16.001.	Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE				198.544.320	268.000.000	
1.2.10.16.003.	Pengembangan E-Government Provinsi Riau				762.203.688	920.000.000	
1.2.10.16.004.	Pengelolaan Multimedia dan Dokumentasi Pemerintah				1.578.937.552	2.231.000.000	

1.2.10.16.005.	Pembinaan PPID Provinsi Riau				399.024.560	475.000.000	
1.2.10.16.006.	Penyebarluasan Informasi				3.222.925.968	936.000.000	
1.2.10.16.007.	Pengelolaan Data dan Interoperabilitas Provinsi Riau				88.114.352	322.000.000	
1.2.10.16.008.	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau				1.902.563.488	1.715.000.000	
1.2.10.16.009.	Penguatan Kelembagaan KIP serta kerjasama dengan				1.000.000.000	1.510.000.000	
1.2.10.16.010.	Pengelolaan Bandwith Internet dan Teknologi VPN				3.216.740.616	5.282.060.000	
1.2.14.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	Persentase Data	80 Persen	85 Persen	577.778.872,00	748570000	
1.2.14.15.004.	Pembinaan Penyelenggaraan Data Sektoral dan Spasial				115.539.000	169.600.000	
1.2.14.15.005.	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi data Sektoral				245.014.584	330.000.000	
1.2.14.15.006.	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah				217.225.288	248.970.000	
1.2.15.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Persentase Perangkat	80 Persen	85 Persen	645.613.312,00	831090000	
1.2.15.15.005.	Tata Kelola Keamanan Informasi				318.602.656	427.000.000	
1.2.15.15.006.	Pengembangan Layanan Kemanan Informasi				232.185.328	256.000.000	
1.2.15.15.007.	Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi				94.825.328	148.090.000	
JUMLAH					18.412.068.962	19.314.400.000	

Sumber : Sistem i-Planning pada Tahapan Final RKPD; 2020

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Daerah Riau. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Riau, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang perlu mendapat perhatian dan menjadi catatan penting kedepan dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah ketersediaan anggaran. Seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan atau sebaliknya ketidaktersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap dokumen perencanaan dan dokumen penganggarnya (penyesuaian target kinerja) sehingga target dan capaian

sasaran program/kegiatan dapat lebih terukur sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Gubernur Riau dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Rencana Kerja Diskominfo Provinsi Riau ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Penyusunan Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan umpan balik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah adalah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja SKPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Untuk dapat meningkatkan kinerja diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran serta adanya komitmen pemangku kepentingan dan personil Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau serta didukung segenap *stakeholders* yang ada.

Dalam pelaksanaan program/kegiatannya dijumpai beberapa kendala dan hambatan :

5. Kurangnya tenaga teknis yang memiliki kapasitas dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian;
6. Kurang lengkapnya inventarisasi data bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian yang ada di Provinsi Riau;
7. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional lapangan untuk menunjang kegiatan inventarisasi dan pembinaan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian;
8. Perubahan Regulasi yang kadang tidak disertai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau diusahakan untuk menempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja dinas, yaitu :

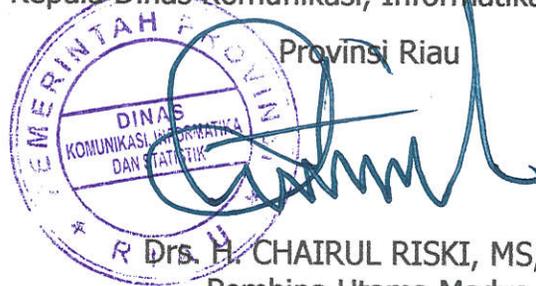
1. Tersedianya SDM yang memiliki kapasitas di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Tersedianya kegiatan inventarisasi data di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi Riau;

3. Tersedianya dana pengawasan, pembinaan dan penyuluhan;
4. Tersedianya dana operasional kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
9. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional lapangan untuk menunjang kegiatan inventarisasi dan pembinaan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian;

Selanjutnya kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Pekanbaru, Agustus 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau



Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19651216 199109 1 001